

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran)

**Levina Rachmawati Putri¹,
Maulina Agustin²**
Institut Teknologi dan Bisnis Diniyyah Lampung¹⁻²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pesawaran, penelitian ini menggunakan variabel independen kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, teknologi informasi, serta variabel dependen nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 54 orang responden. Metode analisis yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan variabel kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah dan teknologi informasi tidak berpengaruh. Selain itu variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah dan teknologi informasi tidak berpengaruh.

Keywords: pelaporan keuangan pemerintah daerah, nilai informasi, kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, teknologi informasi

1. PENDAHULUAN

Dilihat dari pesatnya perkembangan dan persaingan dunia organisasi sangatlah ketat sehingga mempengaruhi meningkatnya tuntutan terhadap sektor publik di Indonesia termasuk menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah melaksanakan amanat rakyat. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, yang mana sekarang sudah dirubah menjadi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

Informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai contoh, pemberian opini oleh BPK-RI atas LKPD kabupaten di Provinsi Lampung bahwa masih ada beberapa kabupaten belum dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), salah satunya Kabupaten Pesawaran. Seperti yang telah diungkapkan dalam (www.bandarlampung.bpk.go.id/?p=5125), Senin, 30 Juni 2014 pukul 09.00 WIB dilaksanakan penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Lampung TA. 2013 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung. BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung telah menyelesaikan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2013 pada 14 entitas Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi

Lampung. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA. 2013 tersebut terdapat 5 entitas mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terdapat 9 entitas dan opini Tidak Wajar (TW) terdapat 1 (satu) entitas.

Selain itu, seperti dilansir dari *Surat Kabar Tribun Lampung (Kamis, 19 Juli 2012)* – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus. Menurut Novy (Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung), pemberian opini WDP atas LK TA 2011 pada Pemkab Tanggamus, Pesawaran, dan Pringsewu karena adanya beberapa permasalahan yang mempengaruhi kewajaran atas laporan keuangan. Antara lain meliputi selisih nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan TA 2011.

Pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan dan ketepatanwaktuan sebagai unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Arfianti (2011), untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Arfianti (2011) melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). Arfianti (2011) dalam penelitiannya mengkonfirmasi nilai informasi pelaporan keuangan dengan menggunakan 4 (empat) variabel : teknologi informasi, kualitas sumber

daya manusia, sistem pengendalian intern, faktor eksternal (pengawasan keuangan daerah). Arfianti (2011) mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sebanyak 110 eksemplar, yang dibagikan kepada responden yang merupakan kepala dan staf bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan PLS (*partial least square*). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

Sukmaningrum (2012) melakukan penelitian dengan mengangkat topik “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)”. Sukmaningrum (2012) dalam penelitiannya menganalisis tiga faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, faktor eksternal. Sukmaningrum (2012) mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 150 eksemplar, yang dibagikan kepada responden yang merupakan staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Derah Kabupaten Semarang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS 17.00. Hasil analisis yang dilakukan menyimpulkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh. Kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor eksternal tidak dapat

digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Faktor eksternal berperan sebagai variabel bebas dan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hal ini dikarenakan dinamika perubahan sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh kesiapan sumber daya manusia dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik.

Hasil dari kedua penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga penelitian ini diberi judul : “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah? ; 2. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah? ; 3. Apakah penerapan sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah? ; 4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

2. METODOLOGI

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, dengan klasifikasi khusus hanya kepada kepala atau staf sub bagian akuntansi / tata usaha keuangan. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 4 bulan.

B. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kuantitatif*, yaitu data yang berupa angka yang dapat dihitung. Menurut sumbernya data

yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang informasinya diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan berupa data subyek (*self report data*) yang berupa karakteristik dan tanggapan dari responden. Data primer dalam penelitian ini adalah :

1. Karakteristik responden yaitu jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir.
2. Tanggapan responden atas kompetensi sumber daya manusia (SDM), pengawasan keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian intern (SPI), pemanfaatan teknologi informasi dari para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan yang bekerja pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, yang meliputi kepala atau staf sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan.

Sumber data adalah kepala atau staf yang melaksanakan fungsi dibagian akuntansi/tata usaha keuangan yang bekerja pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuisisioner, dimana pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti dibagikan kepada responden yang bersangkutan untuk diisi. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu peneliti memasukan surat ijin penelitian dari fakultas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk kemudian menunggu ijin dari pimpinan. Tahap kedua berupa pembagian kuisisioner dengan menitipkan kuisisioner tersebut dengan mendatangi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kemudian diambil kembali.

C. Analisis Data

Dalam penyelesaian penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuatifikasi data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis regresi linier berganda. Alasan penggunaan dikarenakan penelitian ini meneliti hubungan pengaruh sehingga yang cocok

digunakan adalah alat analisis regresi berganda. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian dianalisis dengan berbagai uji statistik sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya (Ghozali, 2009:49).

2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *cronbach alpha* di atas 0,6 (Ghozali, 2009:45).

3. Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif ini merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan, peringkasan, dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna dan juga menatanya ke dalam bentuk yang siap untuk dianalisis. Dengan kata lain, statistika deskriptif ini merupakan fase yang membicarakan mengenai penjabaran dan penggambaran termasuk penyajian data.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran umum mengenai demografi responden dalam penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian (sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah, teknologi informasi).

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang didalamnya terdapat beberapa uji, seperti : uji multikolinieritas, uji heteroskedastitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.

5. Analisis Regresi Berganda

Mengingat terdapat 4 variabel bebas dan satu variabel terikat dalam penelitian ini, maka untuk menjawab Hipotesis yang ada dalam penelitian ini digunakan alat analisis yaitu regresi linier berganda. Analisis regresi berganda merupakan alat statistik yang bermanfaat untuk mengetahui hubungan antar variabel, yaitu variabel X (*variabel independen*) dan Y (*variabel dependen*). Analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

DATA DAN SAMPEL

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang melibatkan kepala SKPD bagian keuangan dan staf SKPD bagian pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Pesawaran sebagai responden penelitian. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 responden. Sampel dalam penelitian ini adalah di Komplek SKPD Pemda Kabupaten Pesawaran.

Tabel 4.1. Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Distribusi Kuisisioner	54	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	19	37%
Kuisisioner yang diolah	35	43%
N Sampel = 35		
Responden Rate = $(35/54) \times 100\% = 64,81\%$		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dalam proses mendapatkan sampel penelitian dilakukan penyebaran kuesioner sebanyak 54 kuesioner, dari hasil tersebut 35 kuesioner terisi. Tingkat respon rate adalah $(35/54) \times 100\% = 64,81\%$. Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 54 eksemplar kepada karyawan. Seluruh kuesioner yang disebarkan sebanyak 54 eksemplar, kembali 35 dan yang tidak kembali sebanyak 19 eksemplar.

ANALISIS DESKRIPTIF RESPONDEN

Data yang digunakan diambil dari responden yang terdiri dari kepala SKPD bagian keuangan dan staf SKPD yang bekerja dibagian keuangan pada SKPD Kabupaten Pesawaran.

Tabel 4.2. Profil Responden

Ket	Kriteria	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	22	62,9%
	Wanita	13	37,1%
	JUMLAH	35	100%
Usia	<25 tahun		
	26–30 tahun	4	11,4 %
	31– 40 tahun	14	40,0 %
	> 40 tahun	17	48,6 %
	Lainnya	0	0%
	JUMLAH	35	100%
Pendidikan Terakhir			
	S1	6	14,3 %
	S2	25	71,4 %
	S3	4	14,3 %
	JUMLAH	35	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

HASIL PENGUJIAN REGRESI BERGANDA

1. UJI NORMALITAS

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *kolmogrov-smirnov* menunjukkan variabel dependen dan variabel independen data terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *kolmogrov-smirnov* secara seluruh variabel dependent dan variabel independent $>0,05$ dan signifikansi $>0,05$, yaitu 0.215 dan 0,054. Hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal. Karena signifikansi untuk seluruh variable lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengujian semua variabel independen menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari angka 10. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi yang digunakan.

3. Uji Autokorelasi

Dapat disimpulkan nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau *upper bound* (dU), ($1.6528 < 1.797$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi.

4. Uji Heterokedastisitas

Hasil dari ke dua Uji Glejser yang dilakukan diatas dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Diatas menunjukkan bahwa hasil dari uji Glejser menunjukan hampir semua nilai tidak signifikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Hasil uji koefisien determinasi (R²) ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Persamaan 1 Koefisien Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,911 ^a	,829	,806	3,03486	2,147

- a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi , Sistem Pengendalian Intern , Pengawasan Keuangan Daerah , Sumber Daya Manusia
- b. Dependent Variable: Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terlihat dalam tabel bahwa pada persamaan diketahui nilai R² adalah 0,829, hal tersebut berarti bahwa 82,9% variabel, TI, PKD, SPI, SDM memiliki nilai R² sangat bagus dan bisa dijadikan keyakinan mengenai data tersebut.

Tabel 4.4. Persamaan 2 Koefisien Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,898 ^a	,806	,787	2,56609	1,797

- a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi , Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia
- b. Dependent Variable: Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terlihat dalam tabel bahwa pada persamaan diketahui nilai R² adalah 0,806, hal tersebut berarti bahwa 80,6% variabel, TI, PKD, SDM memiliki nilai R² sangat bagus dan bisa dijadikan keyakinan mengenai data tersebut.

HASIL UJI F

Berikut hasil uji F kepada 2 persamaan :

Tabel 4.5. Hasil Uji F Persamaan 1

ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regresion	1341,231	4	335,308	36,405	,000 ^b
Residual	276,312	30	9,210		
Total	1617,543	34			

a. Dependent Variable: Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Tabel didapatkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $36,405 > 2,49$ dan sig 0,000 yang berarti nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka artinya variabel bebas dari penelitian yang meliputi Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian berarti persamaan model regresi bersifat layak di gunakan.

Tabel 4.6. Hasil Uji F Persamaan 2

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regresion	848,842	3	282,947	42,970	,000 ^b
Residual	204,129	31	6,585		
Total	1052,971	34			

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Tabel didapatkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $42,970 > 2,49$ dan sig 0,000 yang berarti nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka artinya variabel bebas dari penelitian yang meliputi Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian berarti persamaan model regresi bersifat layak di gunakan.

HASIL UJI HIPOTESIS (Uji t)

Diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.6. Uji t Persamaan 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-6,746	7,494		-,900	,375
Sumber Daya Manusia	2,836	,501	1,175	5,657	,000
Pengawasan Keuangan Daerah	,504	,530	,156	,950	,350
Sistem Pengendalian Intern	-1,272	,542	-,356	-2,349	,026
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-,384	,422	-,141	-,910	,370

a. Dependent Variable: Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

$$Y1 = -6,746 + 2,836(SDM) + ,504(PKD) + -1,272(SPI) + -,384(TI) + e$$

Tabel 4.7. Uji t Persamaan 2

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-12,126	5,771		-2,101	,044
Sumber Daya Manusia Pengawasan Keuangan Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,918	,407	,985	4,714	,000
	,116	,416	,045	,280	,781
	-,325	,355	-,148	-,916	,367

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

$$Y_2 = -12,126 + 1,918(SDM) + ,116(PKD) + -,325(TI) + e$$

Berikut hasil pengujian hipotesis :

Tabel 4.8. Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Sig	Keputusan
H1	SDM terhadap keandalan	0,000	H1 terdukung
H2	SDM terhadap ketepatan waktu	0,000	H2 terdukung
H3	PKD terhadap keandalan	0,350	H3 tidak terdukung
H4	PKD terhadap ketepatan waktu	0,780	H4 tidak terdukung
H5	SPI terhadap keandalan	0,026	H5 terdukung
H6	TI terhadap keandalan	0,370	H6 tidak terdukung

H7	TI terhadap ketepatan waktu	0,367	H7 tidak terdukung
----	-----------------------------	-------	--------------------

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menghasilkan H1 diterima, yang berarti bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hasil analisis ini mendukung teori bahwa sumber daya manusia merupakan elemen utama suatu organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti modal, teknologi dan uang sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain (Prasetyo, 2015). Hasil penelitian ini konsisten dengan Celviana (2013), Primayana *et al* (2014) yang menyatakan sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pada hipotesis kedua, H2 diterima yang berarti bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y2). Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa Sumber Daya Manusia ternyata mampu menentukan cepat atau lambat penyajian pelaporan keuangan daerah disajikan, serta adanya perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah (Nihayah, 2015), dan hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian dari Celviana (2013), Primayana *et al* (2014) dan Arfianti (2011).

H3 ditolak, yang berarti bahwa Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y1). Banyaknya tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel maka sudah saatnya peran pengawasan ditingkatkan dan diberdayakan sehingga tidak hanya sebatas wacana dan cita-cita saja, akan tetapi sungguh-sungguh terwujud guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini konsisten dengan Arfianti (2011) yang menyatakan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H4 ditolak, yang berarti bahwa Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Pemerintah Daerah (Y2). Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem yang efektif. Hasil penelitian ini konsisten dengan Arfianti (2011) yang menyatakan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H5 diterima, yang berarti bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y1). Berdasarkan PP. 60 tahun 2008 SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan Arfianti (2011) yang menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H6 ditolak, yang berarti bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y1). Pemanfaatan teknologi informasi terutama dalam pelaporan keuangan daerah, agar laporan keuangan daerah tetap dapat diandalkan, maka perlu adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk memproses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses unit kerja dan membangun jaringan sistem informasi manajemen. Hasil penelitian ini konsisten dengan Arfianti (2011) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H7 ditolak, yang berarti bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y2). Hal ini kemungkinan disebabkan karena teknologi yang digunakan hanya sebatas penggunaan komputer untuk menginput data transaksi secara manual. Hal ini kemungkinan tidak banyak membantu dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan (Desmiyawati, 2014) yang

menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dikemukakan penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Hubungan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak variabel lain, seperti variabel-variabel baru yang diidentifikasi sebagai variabel pendeteksi praktiknya.
2. Penelitian kedepan diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang praktik baik secara langsung ataupun tempat berlangsung dalam penelitian tersebut.
3. Penelitian berikutnya perlu ditambahkan metode wawancara secara langsung pada responden dalam upaya mengumpulkan

data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Stella. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi, Pengawasan dan Desentralisasi Fiskal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi, Informatics & Business Institute Darmajaya, Bandar Lampung.
- Anggraeni, D.T, dan Ridwan, Akhmad. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 3.
- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Diawati, Muslikha. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Laporan Keuangan Daerah. Naskah Publikasi.
- Fernanda, Hendrick. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S.S. 2013. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta : Rajawali Pers.
- IBI Darmajaya. 2011. *Panduan Penyusunan Karya Ilmiah*. IBI Darmajaya. Bandar Lampung.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
- Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
- Kabupaten Pesawaran. 2013. *Himpunan Peraturan Daerah*.
Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
- Mega, A.P, Adiputra, I.M.P, dan Sinarwati, M.K. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal S1 AK*. Vol.3 No.1.
- Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, pasal 1 No. 2 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- <http://www.kompasiana.com/klinikakuntansi/karakteristik-laporan-keuangan-yang-berlaku-di-indonesia.html>
- <http://www.bandarlampung.bpk.go.id>
- UU No. 17 Tahun 2003 pasal 32 tentang Keuangan Negara.
- BPK RI, 2009

